

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| NO | JENIS INFORMASI | ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM) | JANGKA WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|--|--|--|---|---|
| | | | | AKIBAT JIKA DIBUKA | MANFAAT |
| 1 | Data Pribadi Pegawai Daftar riwayat hidup pegawai Hasil general check up kesehatan pegawai Hasil evaluasi kapablilitas/ intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai menduduki jabatan publik rahasia pribadi Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal Pegawai Negeri Sipil (PNS) Elektronik Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Melindungi hak pribadi |
| 2 | Penjatuhan Hukuman disiplin : Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas Keputusan hukuman disiplin dari Instansi terkait Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA dentitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat (1) dan (2); Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS | Sampai memperoleh persetujuan dari yang berwenang | Bertentangan dengan praduga tak bersalah | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |
| | Dokumen Perceraian | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 3 | Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h; | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik | Akan Mengungkap Data pribadi PNS | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |
| 4 | Daftar Rencana Penempatan PNS Data usulan penempatan pemindahan dan pengangkatan PNS Data usulan pemindahan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; | Sampai diterbitkan SK | Akan menghambat proses penempatan dan pemindahan | Mencegah kolusi dan iklim yang kondusif di lingkungan kerja |
| 5 | Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j; Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Sampai ada keputusan yang berkuatan hukum tetap | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |
| 6 | Penilaian prestasi kerja dan absensi pegawai | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 4; | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan | Mengungkapkan data pribadi pegawai | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |

Banda Aceh, 25 Mei 2022
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag., M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003